

DESENTRALISASI KEBIJAKAN KURIKULUM DI MAN BARITO SELATAN

SITI MARHAMAH

Pascasarjana IAIN Palangka Raya
e-mail : marhamahsiti101@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk inovasi berupa inovasi *top down* yang diselenggarakan di satuan pendidikan berupa inovasi kurikulum. Metode dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu mencari literatur yang relevan dengan topik yaitu penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Subjek dalam penelitian ini adalah guru di MAN Barito Selatan yang baru menerapkan Kurikulum Merdeka di Kelas X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum merdeka di MAN Barito Selatan harus melalui pelatihan yang dilakukan secara intensif untuk memberikan pemahaman terkait penerapan kurikulum merdeka di madsarah.

Kata Kunci: kebijakan *top-down*, kurikulum merdeka

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the form of innovation in the form of top down innovation which is held in educational units in the form of curriculum innovation. The method in this research is a literature study, namely searching for literature that is relevant to the topic, namely the application of an independent curriculum in educational units. The subjects in this study were teachers at MAN Barito Selatan who had just implemented the Merdeka Curriculum in Class X. The results showed that the implementation of the independent curriculum at MAN Barito Selatan had to go through intensive training to provide an understanding regarding the implementation of the independent curriculum at madsarah.

Keywords: top-down policy, independent curriculum

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam arti yang sebenarnya adalah segala bentuk interaksi manusia di dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama. Dengan demikian, penanggulangan krisis masyarakat Indonesia dewasa ini dan usaha reformasi kehidupan yang akan datang merupakan pula program yang sangat esensial dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Sangat ironis sekali kalau dalam proses pendidikan di sekolah misalnya mengajarkan tentang moral, agama, kejujuran, menghormati orang lain, kedamaian, sopan santun, dan sebahainya. Sementara di luar sekolah para anak didik dihadapkan pada suatu kenyataan seperti tindak kekerasan, perampokan, korupsi, pemerkosaan, dan sebagainya. Artinya, antara apa yang didapatkan dalam proses pendidikan di sekolah yang banyak menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan justru tidak sejalan dengan kenyataan di luar sekolah (Pradana & Ma'ruf, 2020).

Desentralisasi pendidikan, mencakup tiga hal, yaitu; (1) manajemen berbasis lokasi (site based management); (2) pendelegasian wewenang; dan (3) inovasi kurikulum. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan sekolah yang menekankan pada otonomi sekolah dan mengoptimalkan partisipasi warga sekolah, yaitu; guru, pegawai tata usaha, komite sekolah dan komunitas sekolah lainnya dalam pengambilan keputusan.

Sudah cukup lama negara kita menerapkan kebijakan otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan ini maka negara kita ingin membuka ruang untuk mengembangkan sistem desentralisasi. Adanya otonomi daerah tentu berdampak pada pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi, upaya otonomi pendidikan akan berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan

tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah. Di sisi lain, keragaman potensi dan sumberdaya daerah dapat menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi.

Inovasi model Top Down ini sengaja diciptakan oleh atasan (pemerintah) sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya. Dan bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya. Contoh adalah yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Seperti penerapan kurikulum, kebijakan desentralisasi pendidikan dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan nasional hendaknya hanya berfungsi sebagai acuan umum pendidikan nasional, sedangkan secara praktis harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah dalam penyusunannya. Jika setiap kebijakan hanya merupakan turunan dari atasan, maka sebenarnya sekolah belum sungguh-sungguh merdeka, kurikulum pun belum merdeka. Penerapan Kurikulum Merdeka ini mengacu pada Keputusan Menteri Agama nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah. Kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan fleksibel sehingga selaras dengan semangat kemandirian madrasah (Kemenag, 2019).

Pendidikan di Indonesia sudah mengarah pada konsep pendidikan yang memanusiakan manusia. Siswa tidak lagi dipandang sebagai individu yang perkembangan belajarnya selama beberapa tahun hanya diukur dengan rangkaian-rangkaian tes terstandar yang tidak mengukur sampai ke tahap berpikir yang tinggi. Selain itu, pendidikan juga sudah beranjak dari sistem pengkastaan berdasarkan favorit atau tidak favoritnya lembaga pendidikan (Mauizdati, 2020).

Pada tahun 2015, Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) menerbitkan laporan yang berfokus pada masalah mendesak di abad ke-21 yaitu kesenjangan keterampilan dan cara untuk mengatasinya melalui teknologi (Gambar 1). Dalam laporan itu, ditetapkan 16 keterampilan penting untuk pendidikan di abad ke-21 meliputi enam literasi dasar, empat kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan, serta enam keterampilan yang diberi label kualitas karakter. Kualitas karakter adalah cara siswa memandang perubahan lingkungan hidup; termasuk keingintahuan, kemampuan beradaptasi, kemampuan sosial dan kesadaran budaya (Hudaya & Supriyanto, 2020).

Kebijakan kurikulum di madrasah membutuhkan dasar-dasar dalam pembuatannya, antara lain: dasar filosofis, dasar psikologis, dasar sosiologis, dasar organisatoris, dasar perkembangan IPTEK, dasar agama dan dasar politik. Tahapan-tahapan yang harus digunakan dalam pembuatan kebijakan kurikulum di madrasah ibtidaiyah, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Ulum & Sholihah, 2020). MAN 1 Barito Selatan merupakan madrasah yang berada di kota Buntok dan saat ini menerapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum pembelajaran di sekolah. Kurikulum Merdeka saat ini digunakan oleh peserta didik kelas X (sepuluh), sedangkan kelas XI dan XII masih menggunakan kurikulum 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di MAN Barito Selatan, yang beralamat Jl. R. A. Kartini No. 044 Buntok, Kabupaten Barito Selatan dengan judul desentralisasi kebijakan kurikulum di MAN 1 Barito Selatan. Penelitian dilakukan dengan observasi / pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data. Subjek penelitian ini adalah informan yang berasal dari guru dan kepala madrasah untuk mendapatkan informasi terkait kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Agustus s/d Oktober 2022.

Penelitian ini merupakan sebuah studi literatur (*literature review*) yaitu sebuah pencarian dan merangkum beberapa literatur empiris yang sesuai dan relevan dengan tema. Literatur yang digunakan adalah literatur relevan dengan studi ini dan telah dicetak maupun dipublikasikan. Penelitian ini kemudian dikaji menggunakan kajian literatur yang membahas pentingnya topik dan membandingkan hasilnya dengan temuan pada penelitian lain pada topik yang sama dan pada akhirnya menghasilkan sebuah gagasan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan sumber yang terdapat di perpustakaan seperti buku, jurnal, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil pencarian terhadap studi literatur yang relevan didapatkan 5 buah jurnal yang mengulas implementasi kurikulum merdeka di lembaga pendidikan yang menjadi tolak ukur implementasi dan kesiapan guru dalam menggunakan kurikulum di sekolah. Literatur jurnal terkait kurikulum merdeka disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Implementasi kurikulum merdeka di madrasah

No	Nama Penulis	Judul	Publikasi	Hasil
1	Syamsul Huda Rohmadi	Mapping Dan Orientasi Kurikulum Merdeka Berbasis Kearifan Lokal Di Pendidikan Dasar	Jurnal	Desain pembelajaran dengan implementasi kurikulum merdeka dengan memperhatikan kemajuan wawasan global yang berbasis kearifan nilai-nilai budaya lokal yang merupakan dasar pendidikan karakter menghadapi era digital dan milenial, dengan melihat struktur keilmuan dan implementasi kurikulum pembelajaran di Pendidikan dasar, diharapkan pendidikan dasar berwawasan global dan berpijak pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
2	M. Bustanul Ulum Mar'atus Sholihah	Dasar-Dasar Kebijakan Kurikulum Di Madrasah Ibtidaiyah	Jurnal	Dasar kebijakan kurikulum di madrasah ibtidaiyah tidak hanya terdiri dari dasar filosofis, psikologis, sosiologis, perkembangan IPTEK, organisatoris, dan politik, namun juga sangat lekat dengan dasar agama sebagai bagian dari lembaga yang mengajarkan pendidikan agama melalui pendidikan formal. Dasar agama ini menjadi penting untuk disematkan dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah sebagai upaya menjawab permasalahan modern tentang perilaku anak dan remaja, terutama anak. Pemberian pondasi agama yang dilakukan sejak masa anak-anak dipercayai mampu memperkuat pembentukan perilaku baik (akhlak baik), seperti yang telah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Huda Rohmadi menyatakan bahwa penerapan kurikulum merdeka harus memasukkan nilai-nilai budaya kearifan lokal yang merupakan dasar pendidikan karakter. Lebih lanjut M. Bustanul Ulum *dkk* menyatakan bahwa penerapan kurikulum merdeka harus dibarengi dengan pemberian pondasi agama yang dilakukan sejak masa anak-anak dipercayai mampu memperkuat pembentukan perilaku baik (akhlak baik), Kurikulum Merdeka” di tingkat satuan pendidikan dapat mengurangi Learning Loss selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian Khalimatus Sadiyah, *dkk* menyatakan bahwa perlu pelatihan dan pendampingan dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, sehingga tenaga pendidika bisa optimal menerapkannya di lapangan.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan (Hudaya & Supriyanto, 2020) menyatakan bahwa cara pandang masyarakat terhadap pendidikan akan menentukan bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan sebuah pendidikan akan diberlakukan. Konsep pendidikan Merdeka Belajar digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan ruang baru bagi insan pendidikan untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kerangka kemerdekaan tersebut perlu disikapi dengan cermat agar penyelenggaraan pendidikan tetap menyentuh pada nilai-nilai pendidikan yang dicita-citakan oleh bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan humanistik holistik memberikan arah yang tepat ke mana pendidikan nasional seharusnya dilakukan.

Pembahasan

Inovasi merupakan bagian dari validasi dan perluasan keilmuan yang bermanfaat. Salah satu aspek yang penting untuk diinovasi adalah kurikulum. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen utama yang strategis di dalam sistem pendidikan. Asumsi ini memberikan dasar bahwa kurikulum tidak hanya berisi tujuan yang harus dicapai, melainkan juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar bagi mahasiswa. Artinya, dalam perspektif pembelajaran kurikulum merdeka belajar menjadi dasar yang kuat untuk menggerakkan komponen-komponen pembelajaran secara terintegrasi dan bermakna dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya secara global (Suryaman, 2020).

Inovasi dalam Pendidikan dibagi menjadi dua model, yaitu *Top-down*, yaitu model inovasi Pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan; seperti halnya inovasi Pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Selama ini. *Bottom-up*, yaitu model inovasi yang berasal dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu Pendidikan. Perubahan kurikulum/inovasi kurikulum ada, karena adanya masalah yang dirasakan dalam pelaksanaan kurikulum (Kristiawan et al., 2018). Saat ini pemerintah baru menerbitkan kurikulum merdeka yang merupakan jawaban atas perkembangan teknologi dan efek dari pandemic Covid 19 yang melanda dunia selama kurun waktu 2 tahun terakhir.

Penerapan kurikulum merdeka di MAN 1 Barito Selatan baru dilaksanakan tahun pelajaran 2022/2023 di kelas X (sepuluh), artinya masih ada 2 (dua) jenjang yang melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum 2012. Penerapan kurikulum merdeka di MAN 1 Barito Selatan merupakan kebijakan *Top-down* yaitu model inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak atasan kepada bawahan dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional yang diterapkan di satuan Pendidikan.

Tabel 2. Empat kebijakan pendidikan nasional “Kurikulum Merdeka”

Kebijakan	Penjelasan
1. USBN menjadi asesmen sekolah	Menilai kompetensi siswa, melalui tes tertulis dan bentuk penilaian yang komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah.
2. UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survey karakter	Tidak mengukur penguasaan materi mapel dalam kurikulum seperti yang diukur melalui UN selama ini. UN ke depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi minimum literasi dan numerasi siswa dan memperkuat aplikasi pembelajaran yang diukur oleh PISA dan TIMSS, dilakukan di tengah jenjang sekolah (kelas 4, 8, 11)
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Guru bebas memilih, membuat, mengembangkan dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan evaluasi proses pembelajaran secara terarah.
4. Sistem zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel	Mengatasi ketimpangan akses akan kualitas di berbagai daerah. Ada patokan standar PPDB antar daerah, yaitu jalur zonasi menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5% dan jalur prestasi atau sisa 0-30% sesuai kondisi daerah.

Sumber : <https://pgri.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Merdeka-Belajar-UNJ-proses.pdf>

Sekolah yang berada di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan saat ini terlibat dan aktif dalam kegiatan sekolah penggerak, hal ini sangat membantu dalam penerapan kurikulum merdeka. Berbeda dengan sekolah yang berada di bawah kementerian agama, penerapan kurikulum merdeka masih belum optimal akibat kurangnya pelatihan atau informasi yang masuk ke sekolah.

Kurikulum Merdeka adalah salah satu program yang cukup banyak mendapat perhatian dari pihak pemangku pendidikan dan juga publik. Ketika suatu kurikulum diputuskan untuk diganti, maka perlu ada alasan yang kuat bahwa kurikulum yang baru lebih relevan dengan perkembangan zaman, alih-alih sekadar keharusan menciptakan kebijakan sebagai menteri yang baru. Kurikulum Merdeka menjadi sebuah tawaran yang menarik bagi dunia pendidikan guna merespons perubahan dan perkembangan zaman. Namun, tawaran ini tentu harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya yang ada di masyarakat, mulai dari infrastruktur, fasilitas, hingga jumlah guru.

Metode pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0 dapat menentukan kesuksesan pembelajaran. Dan metode yang digunakan beragam, namun dalam sistem pendidikan merdeka belajar metode *Blended Learning* sangat ideal sebagai metode pembelajaran. Metode

Blended Learning yaitu menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual. Dalam penelitian ini menguatkan teori dari Peter Fisk tentang trend kecenderungan pendidikan pada era industri 4.0 (Yamin & Syahrir, 2020).

Merdeka belajar memerlukan transformasi kurikulum sekolah kearah kurikulum sekolah yang terdiversifikasi standar Nasional disusun oleh pusat untuk dijabarkan lebih lanjut menjadi standar provinsi dan standar Kabupaten/kota; standar pendidikan perlu diukur dan diremajakan secara teratur; program pendidikan beragam tujuannya, maka pendidikan yang berbasis kepentingan nasional melalui PPKN, Pend. Agama, Bhs Indonesia, Matematik dan pendidikan global akan menjadi alat pemersatu bangsa. Pendidikan dan pelatihan literasi dan numerasi dasar adalah inti dari kurikulum sekolah menuju berkembangnya kemampuan belajar sepanjang hayat, Beban pendidikan pengetahuan dasar (mata pelajaran) harus dikurangi sebatas yang diperlukan untuk praktek, dan dilaksanakan melalui pembelajaran tematik, sebagian besar konten kurikulum sekolah adalah aplikasi literasi dalam bentuk kecakapan hidup (life skills) sesuai dengan kebutuhan wilayah; pemda perlu diberikan wewenang dan kemampuan untuk menyusun kurikulum tersebut; sekolah diberikan kewenangan untuk membuat menu Pendidikan life skills pilihan perorangan dan sekolah harus dapat menjamin penyelenggaraannya (Rosyidi, 2020).

Penerapan kurikulum merdeka belajar yang dilakukan bukan hanya melalui pembinaan saja, bisa melalui pendidikan formal dan non formal agar bisa saling mengenal dan menghargai sesama manusia sebagai negara yang memiliki masyarakat yang plural. Dalam hal ini supervise klinis dalam penerapan kurikulum merdeka belajar di SDN 2 Jagong sebagai kegiatan untuk mengubah minat belajar peserta didik, dari pola pikir dan sikap yang menganggap kelompoknya yang paling benar menjadi pola pikir, sikap dan perilaku yang menempatkan semua kelompok, suku, agama, budaya pada posisi yang sederajat. Sehingga tidak ada lagi anggapan yang paling benar dan paling buruk, sehingga pentingnya supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka belajar (Anridzo et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pengamatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan *Top-down* merupakan kebijakan yang berasal dari atas dan turun ke satuan pendidikan dan kebijakan ini harus dilaksanakan karena merupakan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah.
2. Kebijakan *top-down* yang sampai ke satuan pendidikan salah satunya adalah inovasi kurikulum yang selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu kebijakan *top-down* yang diterapkan oleh satuan pendidikan adalah penerapan kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Arah kebijakan kurikulum merdeka adalah lebih menekankan pada memberi kebebasan kepada sekolah untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anridzo, A. K., Arifin, I., & Wiyono, D. F. (2022). Implementasi Supervisi Klinis dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/3990>
- Hudaya, S., & Supriyanto, A. (2020). Pendidikan Humanistik Holistik Sebagai Arah Konsep Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia. ... *Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19*. <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip/article/view/428>
- Kepmenag. (2019). *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kristiawan, M., Suryanti, I., & ... (2018). Inovasi pendidikan. *Jawa Timur ...*
- Copyright (c) 2022 ACADEMIA : Jurnal Inovasi Riset Akademik

- <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/286-materials.pdf>
Mauizdati, N. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Sekolahnya Manusia Dari Munif Chatib. *Jurnal Review Pendidikan Dan*
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/1324>
- Pradana, G. W., & Ma'ruf, M. F. (2020). *Desentralisasi Pendidikan*. statik.unesa.ac.id.
https://statik.unesa.ac.id/profileunesa_konten_statik/uploads/perpustakaan/file/e914e72b-0fc6-4ffe-99fd-fa1564241aa8.pdf
- Rosyidi, U. (2020). Merdeka Belajar: Aplikasinya Dalam Manajemen Pendidikan \& Pembelajaran di Sekolah. *Modul Seminar Nasional "Merdeka Belajar: Dalam*
<http://pgri.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Merdeka-Belajar-UNJ-proses.pdf>
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan*
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13357>
- Ulum, M. B., & Sholihah, M. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah. *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan*
<http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/auladuna/article/view/374>
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan pendidikan merdeka belajar (telaah metode pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*.
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/1121>